

ABSTRAK

Isu keamanan di Selat Malaka, khususnya perampokan bersenjata telah menjadi perhatian dunia sejak lama. Namun Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara pantai baru di tahun 2004 menjalin kerjasama trilateral patroli terkoordinasi MALSINDO untuk mengamankan Selat Malaka. Letak Selat Malaka yang strategis menjadikannya salah satu selat tersibuk di dunia. Selat Malaka menjadi jalur bagi distribusi minyak dan gas alam sebagai kebutuhan keamanan energi dan 1/4 komoditi dagang dunia yang melalui laut. Namun tingginya aktivitas di Selat tidak diimbangi dengan jaminan keamanan. Beberapa kali Selat Malaka dijuluki sebagai perairan rawan akan perampokan bersenjata. Menggunakan konsep kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, dan persepsi ancaman, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama trilateral patroli terkoordinasi MALSINDO adalah bentuk kebijakan luar negeri yang dipilih masing-masing negara pantai dengan dasar untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari persepsi ancaman yang muncul di tahun 2004 oleh masing-masing negara pantai. Perampokan bersenjata di akhir tahun 2001 dikhawatirkan bergeser ke arah terorisme maritim akibat serangan 9/11. Isu terorisme maritim mendorong negara pengguna untuk ikut mengamankan Selat Malaka, hal ini dilihat sebagai intervensi dan ancaman terhadap kedaulatan bagi Malaysia dan Indonesia. Sedangkan Singapura melihat kemungkinan terorisme maritim sebagai inti ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Bagi Singapura, Selat Malaka menjadi penyumbang perekonomian nasional melalui aktivitas kemaritiman. Oleh karena itu isu Selat Malaka selalu membicarakan persinggungan kepentingan negara pengguna dan negara pantai, baik dari aspek ekonomi ataupun keamanan.

Keywords : Indonesia, Kepentingan, Kerjasama trilateral patroli terkoordinasi MALSINDO, Malaysia, Selat Malaka, Perampokan bersenjata, Singapura